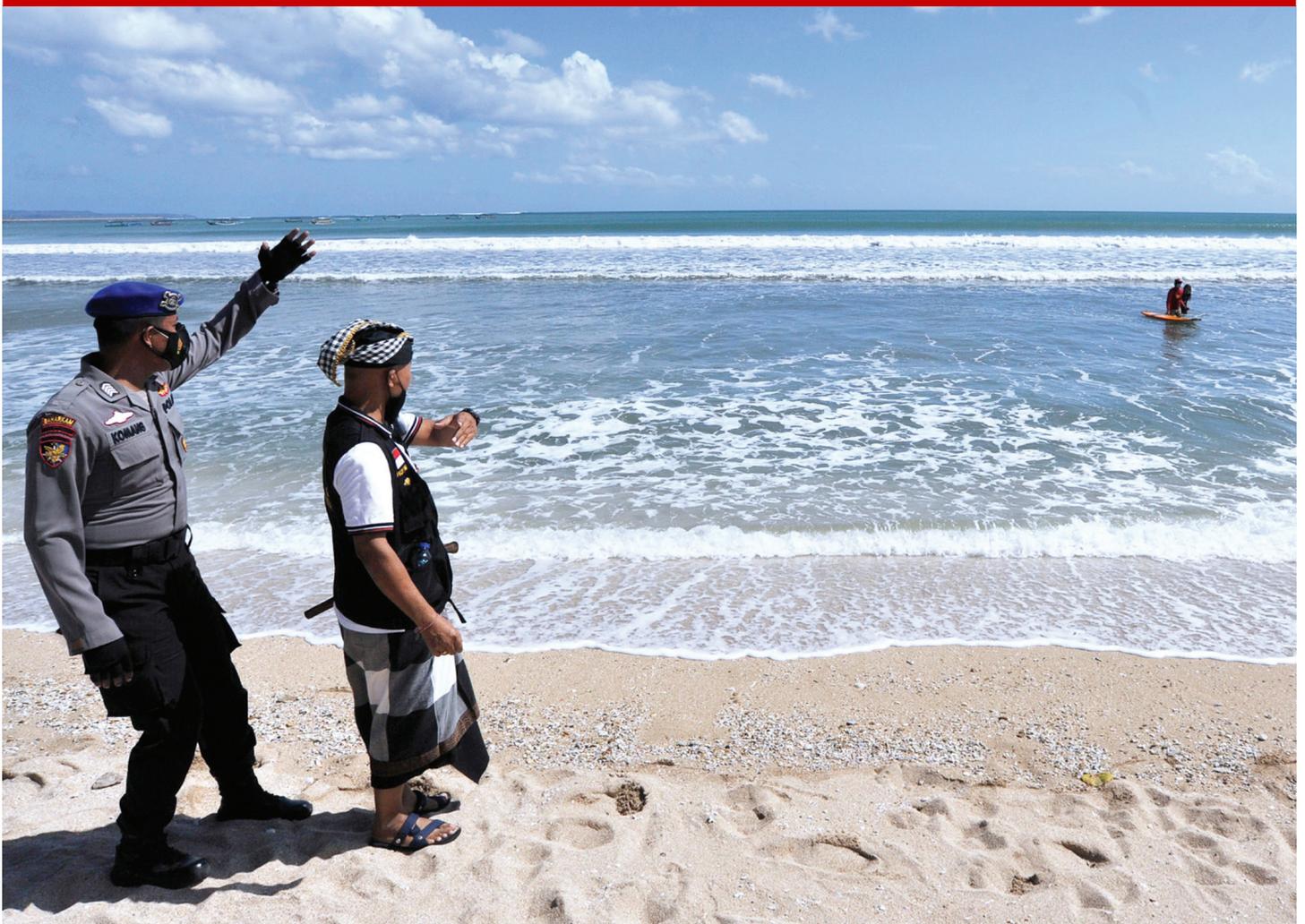


ANTARA BALI

Membangun Karakter Masyarakat Berbasis Informasi Akurat



DESTINASI WISATA DI BADUNG TUTUP SAAT PPKM DARURAT

GUBERNUR BALI
CANANGKAN
VAKSINASI
ANAK-ANAK
MULAI 5 JULI

Hal. 2



PEMKOT DENPASAR
BATASI LAYANAN
PUBLIK TERKAIT
PPKM DARURAT

Hal. 5



HAL
6

Gubernur Bali: PPKM Darurat Berlaku di Sembilan Kabupaten/Kota

Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat COVID-19 yang dimulai dari 3 Juli hingga 20 Juli 2021 berlaku untuk semua atau sembilan kabupaten/kota di Pulau Dewata.

“PPKM Darurat COVID-19 berlaku untuk sembilan kabupaten/kota di Bali sesuai kriteria level tiga,” kata Koster saat menyampaikan keterangan terkait terbitnya Surat Edaran No 9 Tahun 2021 di Jayasabha, Denpasar, Jumat.

Koster mengemukakan SE Gubernur Bali No 9 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat COVID-19 dalam Tatanan Kehidupan Era Baru di Provinsi Bali itu dikeluarkan dengan mempertimbangkan semakin tingginya penularan atau peningkatan kasus COVID-19.

Selain itu, didasarkan pada Instruksi Mendagri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali.

Sebelumnya Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Pemprov Bali I Dewa Nyoman Rai Dharmadi mengatakan PPKM Darurat berlaku di tujuh kabupaten/kota di Bali, yakni di Kota Denpasar, Kabupaten Jembrana, Buleleng, Badung, Gianyar, Klungkung, dan Bangli. Sedangkan Kabupaten Karangasem dan Tabanan disebutkan tidak diikutkan dalam PPKM Darurat.

Namun, dengan terbitnya SE Gubernur Bali tersebut, Kabupaten Karangasem dan Tabanan yang sebelumnya dikecualikan, juga ikut menerapkan PPKM Darurat.

“Dengan pemberlakuan PPKM Darurat ini, pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (sekolah, perguruan tinggi, akademi, dan tempat pendidikan/pelatihan) dilakukan secara daring/online,”



Gubernur Bali Wayan Koster bersama Kapolda Bali Irjen Pol Putu Jayan Danu Putra (kiri) saat memberikan keterangan terkait PPKM Darurat di Jayasabha Denpasar, Jumat (2/7/2021). ANTARA/HO-Pemprov Bali.

ucap Koster:

Sedangkan pelaksanaan kegiatan pada sektor non-esensial diberlakukan 100 persen Work From Home (WFH).

Untuk pelaksanaan kegiatan pada sektor esensial, seperti keuangan dan perbankan, pasar modal, sistem pembayaran, teknologi informasi dan komunikasi, perhotelan non-penanganan karantina COVID-19, industri

orientasi ekspor diberlakukan 50 persen maksimal staf Work From Office (WFO) dengan protokol kesehatan secara ketat.

Sedangkan sektor esensial pada sektor pemerintahan yang memberikan pelayanan publik yang tidak bisa ditunda pelaksanaannya diberlakukan 25 persen maksimal staf WFO dengan protokol kesehatan secara ketat. **(ant)**

Gubernur Bali Canangkan Vaksinasi Anak-anak Mulai 5 Juli



Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra. ANTARA/HO-Pemprov Bali.

GUBERNUR Bali Wayan Koster siap mencanangkan dimulainya vaksinasi COVID-19 untuk anak-anak usia 12-17 tahun di provinsi setempat secara serentak pada 5 Juli 2021.

“Pencanangan vaksinasi COVID-19 untuk anak dipusatkan di SMAN 4 Denpasar yang diikuti secara serentak di seluruh

kabupaten/kota oleh Bupati/Wali Kota,” kata Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra di Denpasar, Minggu.

Selain menjadi bagian penting dalam penanggulangan pandemi, Dewa Indra mengatakan vaksinasi bagi anak usia 12 - 17 tahun ini dimaksudkan mengakselerasi rencana pembelajaran tatap

muka, khususnya untuk jenjang SMP dan SMA.

Dewa Indra yang juga Ketua Harian Satgas Penanganan COVID-19 Provinsi Bali itu menyampaikan beberapa hal penting yang mesti diperhatikan dalam pemberian vaksinasi bagi anak usia 12-17 tahun.

Pertama, pelaksanaan vaksinasi dapat dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan atau di sekolah/madrasah/pesantren berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kanwil/Kantor Kemenag setempat untuk mempermudah pendataan dan monitoring pelaksanaan.

Kedua, mekanisme skrining, pelaksanaan dan observasi sama seperti vaksinasi pada usia di atas 18 tahun. Ketiga, peserta vaksinasi harus membawa kartu keluarga atau dokumen lain yang mencantumkan NIK anak.

Keempat, pencatatan dalam aplikasi PCare vaksinasi dimasukkan dalam kelompok remaja. Hal penting lain yang harus menjadi perhatian petugas adalah vaksinasi bagi anak usia 12-17 tahun menggunakan vaksin Sinovac dengan dosis 0,5 ml sebanyak dua kali pemberian dengan jarak atau interval minimal 28 hari.

Dewa Indra mengharapkan dukungan dan peran aktif seluruh elemen masyarakat untuk menyukseskan vaksinasi COVID-19 bagi anak usia 12-17 ini. Sebab, data terbaru menunjukkan bahwa kecenderungan penularan pada anak belakangan makin mengkhawatirkan.

Data hingga 29 Juni 2021 pukul 18.00 WIB mencatat lebih dari 2 juta orang di Indonesia terkonfirmasi COVID-19, dimana 10,6 persen diantaranya merupakan kasus aktif. **(ant)**

Gubernur Bali Serahkan Bantuan Produktif ke Pelaku Usaha Mikro

GUBERNUR Bali Wayan Koster secara simbolis menyerahkan Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) kepada perwakilan dua orang penerima dari Kota Denpasar, Kabupaten Badung dan Kabupaten Gianyar, yang juga diikuti serentak di seluruh Bali secara virtual.

"Jangan dilihat besar kecilnya bantuan yang diberikan, namun bagaimana bentuk kepedulian pemerintah kepada para pelaku UMKM atas dampak pandemi COVID-19 yang hingga saat ini masih terjadi," kata Koster saat menyampaikan sambutan pada penyerahan BPUM itu di Denpasar, Kamis (8/7) malam.

Koster menambahkan, sesuai arahan Presiden Joko Widodo dalam beberapa kesempatan agar bantuan sosial masa PPKM Darurat dilakukan percepatan realisasinya kepada masyarakat untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional.

"Saya mohon kepada BRI agar segera menyalurkan bantuan ini ke rekening masing-masing penerima sesuai dengan nominal yang telah ditentukan (Rp1,2 juta-red), agar para pelaku UMKM bisa tetap produktif di tengah pandemi," ujarnya.

Terkait dengan masih banyaknya pelaku UMKM yang mampu bertahan di tengah pandemi menggambarkan UMKM di Bali sangat menggeliat diteliti oleh masyarakat.

"Ini akan menjadi pekerjaan rumah saya kedepan, dan mendapat perhatian serius lagi. Di masa sulit seperti sekarang, justru pelaku UMKM ini sangat bisa diandalkan untuk mempertahankan kondisi perekonomian di Provinsi Bali," ucap Koster.

Saat ini, Pemprov Bali juga tengah menyiapkan kebijakan untuk menyeimbangkan struktur perekonomian Bali dari sektor pariwisata bergeser ke pertanian, kelautan dan industri termasuk di



Gubernur Bali Wayan Koster saat secara simbolis menyerahkan Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) kepada perwakilan penerima di Denpasar, Kamis (8/7/2021). ANTARA/HO-Pemprov Bali.

dalamnya industri kecil menengah dan usaha mikro.

Dalam kesempatan itu, Gubernur Koster juga menyampaikan vaksinasi massal sebagai salah satu program yang sangat penting dalam penanganan COVID-19.

"Bagi yang belum melak-

sanakan vaksin, tolong segera ikuti vaksinasi massal ini. Info ke kerabat, saudara untuk ikut juga melaksanakan vaksinasi. Tetap ikuti protokol kesehatan dan patuhi aturan pemerintah yang saat ini tengah menerapkan PPKM Darurat," kata Koster. **(ant)**

Tahun ini, Wagub Bali Minta Seluruh Desa Wisata Urus Sertifikasi CHSE



Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati saat mengikuti webinar Forum Komunikasi Desa Wisata (DEWI) Bali di Denpasar, Sabtu (10/7/2021). ANTARA/HO-Pemprov Bali.

WAKIL Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati meminta seluruh pengelola desa wisata di berbagai daerah di Pulau Dewata untuk segera mengurus sertifikasi CHSE yang difasilitasi gratis oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada tahun ini.

"Seluruh desa wisata di Bali

saya harap menggunakan kesempatan dengan sebaik-baiknya agar tahun ini seluruhnya bisa tersertifikasi," kata Wagub Bali yang biasa disapa Cok Ace itu di Denpasar, Sabtu.

Dalam webinar Forum Komunikasi Desa Wisata (DEWI) Bali yang mengusung tema "CHSE

Desa Wisata Kunci Menerima Wisatawan" menambahkan pada tahun ini, Bali memperoleh program sertifikasi CHSE untuk 1.200 objek kategori hotel dan non hotel.

Sertifikasi CHSE adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha pariwisata, destinasi pariwisata, dan produk pariwisata lainnya untuk memberikan jaminan kepada wisatawan terhadap pelaksanaan kebersihan (cleanliness), kesehatan (health), keselamatan (safety), dan kelestarian lingkungan (environment sustainability).

Dalam kesempatan itu, Cok Ace menekankan tujuh strategi yang mesti diperhatikan dalam menghadapi tren perubahan pada sektor pariwisata.

Salah satu strategi yang menurutnya sangat penting adalah integrasi penerapan protokol kesehatan dan keamanan yang menjadi sebuah kebutuhan mendesak saat ini.

Sebelumnya, ujar Cok Ace, pelaku pariwisata terkesan terlalu

percaya diri dan sudah merasa nyaman dengan kualifikasi yang dimiliki. Padahal, sebaik apapun kualifikasi yang dimiliki, belum bisa meyakinkan jika tak dilengkapi bukti sertifikat.

"Saya contohkan hal kecil, seorang tukang kebun di satu hotel secara kualifikasi punya kemampuan yang andal. Tapi tanpa sertifikat, dia tidak memiliki bukti kalau dia handal," kata pria yang juga Ketua PHRI Bali itu.

Selain pentingnya integrasi penerapan protokol kesehatan dan keamanan, enam strategi lain yang harus mendapat perhatian yaitu memahami perubahan kebiasaan wisatawan, pentingnya campur tangan pemerintah, dan komunikasi marketing untuk pemulihan kepercayaan pasar.

Selanjutnya investasi di bidang teknologi informasi, pengembangan model bisnis baru dengan mengedepankan sistem online dan pentingnya pemahaman cara mempertahankan bisnis. **(ant)**

PPKM Darurat, Polisi Denpasar Semprotkan Cairan Eco Enzyme di Pasar

Anggota Polsek Denpasar Timur bersama komunitas "Eco-Enzyme Nusantara" serta petugas Kelurahan Penatih, Kota Denpasar, Bali, menyemprotkan cairan "eco enzyme" di tiga pasar tradisional di kelurahan setempat saat hari pertama pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

"Salah satu tempat terjadinya penularan adalah di pasar, maka kami sasar pasar," kata Kapolsek Denpasar Timur, Kopol Tri Joko Widiyanto, di Denpasar, Sabtu.



"Karena hanya tiga pasar kami semprot, kami hanya menggunakan 200 liter. Ini aman bagi lingkungan," kata Koordinator Eco-Enzyme Nusantara Bali dan Indonesia Joko Ryanto

Tiga pasar yang disasar yakni Pasar Penatih, Pasar Anggabaya, dan Pasar Tamba, karena pertumbuhan kasus positif di Kelurahan Penatih terus meningkat sehingga dilaksanakan penyemprotan eco-enzyme.

Terkait kegiatan penyemprotan cairan eco-enzyme tersebut menggunakan sebanyak 200 liter eco enzyme. Eco enzyme ini disemprotkan sebagai disinfektan nabati, sehingga tidak berbahaya bagi pengunjung pasar maupun komoditas yang diperdagangkan di pasar tradisional.

la menambahkan eco enzyme ini dibuat dari bahan organik seperti sisa sayur, kulit buah maupun bunga dan dicampur gula aren, sehingga tidak akan berbahaya bagi kesehatan dan pembuatan eco enzyme ini memakan waktu tiga bulan.

"Pada bulan pertama akan menghasilkan alkohol, bulan kedua menjadi asam asetat atau cuka, dan bulan ketiga baru menjadi eco enzyme," katanya.

Pembuatan eco enzyme ini akan mampu menekan gas metana akibat dari pembusukan sampah organik juga untuk menjernihkan



Anggota Polsek Denpasar Timur bersama komunitas "Eco-Enzyme Nusantara" serta petugas Kelurahan Penatih, Kota Denpasar, Bali, menyemprotkan cairan "eco enzyme" di tiga pasar tradisional di kelurahan setempat saat hari pertama pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat (3/7/2021). (Foto Antara News Bali/Nyoman Hendra/2021)

udara, tanah dan juga air.

Selain itu juga bisa digunakan untuk obat bagi manusia seperti obat luka layaknya P3K, hingga obat kaki pecah-pecah dan juga bisa digunakan sebagai sabun cuci tanpa busa sehingga ramah lingkungan.

Penyemprotan ini menyasar

pasar tradisional dikarenakan pasar merupakan salah satu pusat berkumpulnya orang karena pada pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat aktivitas pasar tradisional tetap beroperasi dengan pembatasan jam operasional sampai pukul 20.00 Wita. (ant)

Pemkot Denpasar Mulai Vaksinasi COVID-19 Anak Umur 12-17 tahun



Pemkot Denpasar mulai vaksinasi COVID-19 usia 12-17 tahun (ANTARA/I Komang Suparta/2021)

PEMERINTAH Kota Denpasar, Bali mulai melakukan vaksinasi COVID-19 terhadap anak usia 12-17 tahun dalam upaya menekan pandemi virus corona.

Wali Kota Denpasar, IGN Jaya Negara pada pencaanangan vaksinasi terhadap anak usia 12-17 tahun

di Denpasar, Senin, mengatakan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 pada anak bertujuan untuk mencegah terkena atau mengalami gejala COVID-19 secara akut.

Selain itu, kata Wali Kota Jaya Negara, bahwa tindakan vaksinasi dalam upaya menghentikan pe-

nyebaran COVID19, menghindari penyakit saat dewasa, membantu melindungi generasi selanjutnya serta melindungi orang lain.

"Vaksinasi pada anak usia 12-17 tahun dilaksanakan guna menindaklanjuti arahan pemerintah pusat terkait dengan tingginya penularan COVID-19 pada usia anak-anak," ujarnya.

Pada pelaksanaan pencaanangan vaksinasi usia anak-anak tersebut juga hadir Ketua DPRD Kota Denpasar I Gusti Ngurah Gede, Penjabat Sekda Kota Denpasar, I Made Toya, Plt. Kadisdikpora Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Eddy Mulya, Kadiskes Kota Denpasar Luh Putu Sri Armini, Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Dewa Gede Rai, Camat Denpasar Timur, I Wayan Herman dan Lurah Sumerta, I Wayan Eka Apriana serta Kepala Sekolah

SMPN 8 Wayan Murah.

Jaya Negara lebih lanjut mengatakan melalui vaksinasi COVID-19 pada anak 12-17 tahun, merupakan wujud nyata guna mencegah penularan virus corona pada anak, sebagai upaya penanganan penularan COVID-19 secara berkelanjutan.

Wali Kota Denpasar Jaya Negara mengatakan sebanyak 67 ribu lebih anak di Denpasar menjadi target sasaran pelaksanaan vaksinasi ini. Pelaksanaannya pun akan digelar serentak dan terpusat dengan menyasar sekolah-sekolah.

"Ini sudah menjadi komitmen bersama semoga akhir Juli ini sudah bisa kita penuhi target 67 ribu anak. Untuk ketersediaan vaksin Kota Denpasar sudah siap, jadi akan kita kerjakan, apakah itu SMA atau SMP yang merupakan masyarakat Kota Denpasar," ucapnya. (ant)

Pemkot Denpasar Batasi Layanan Publik Terkait PPKM Darurat

PEMERINTAH Kota (Pemkot) Denpasar, Bali, membatasi pelaksanaan pelayanan publik terkait adanya Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

“Untuk pengurusan dokumen kependudukan, kami hanya layani di kantor sebanyak 50 persen dari sebelum PPKM darurat atau 25 persennya dari hari biasa sebelum pandemi COVID-19,” kata Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, Dewa Gede Juli Artabrata, di Denpasar, Senin.

Biasanya, pelayanan sehari dalam suasana COVID-19 untuk di semua lokasi termasuk di kecamatan sebanyak 400 dokumen kependudukan, namun saat pelaksanaan PPKM darurat ini maksimal 200 dokumen kependudukan saja.

“Kami lakukan sesuai dengan Surat Edaran Wali Kota Denpasar



dalam penerapan PPKM Darurat bahwa pelayanan publik diwajibkan 25 persen yang work from office,” katanya.

Sementara untuk jam pelaksanaan pelayanan masih tetap seperti biasa dari pukul 08.00 hingga pukul 16.00 Wita untuk Senin-Kamis dan hari Jumat hingga pukul 12.00 Wita.

Pihaknya juga mengaku sudah mengajukan permakluman kepada masyarakat lewat camat, perbekel dan lurah terkait hal ini. Jika pengurusan dokumen tersebut sifatnya tidak urgen agar bisa ditunda hingga 20 Juli 2021.

“Kalau tidak urgen sekali, mohon bisa ditunda, kalau misalnya untuk mengurus BPJS, mencari sekolah, pasti akan kami utamakan,” katanya.

Untuk staf yang disiagakan di pelayanan kependudukan hanya 50 persen, sedangkan untuk staf di luar pelayanan yang bekerja di kantor hanya 25 persen.



Pemerintah Kota (Pemkot) Denpasar, Bali, membatasi pelaksanaan pelayanan publik secara luring maksimal 25 persen dengan adanya Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, sedangkan sisanya (75 persen) diarahkan untuk melakukan pengurusan dokumen menggunakan sistem online/daring. (Foto Antara News Bali/Nyoman Hendra/2021)

“Petugas kami di kantor camat juga kami batasi, yang biasanya ada empat orang staf, sekarang hanya dua orang saja,” katanya.

Ia menambahkan pihaknya juga menghentikan sementara perekaman e-KTP dengan sistem jemput bola. Jika ada yang akan membuat e-KTP bisa melalui kepala lingkungan atau kepala du-

sun atau pihak desa yang nantinya akan meneruskan ke Disdukcapil ataupun petugas di kecamatan.

“Perekaman kan tidak bisa online, jadi sistemnya melalui kepala lingkungan atau pihak desa maupun lurah yang mengumpulkan berkas, nanti yang membuat langsung datang saat perekaman saja,” katanya. **(ant)**

Tim Gabungan Denpasar Putar Balik 63 Kendaraan Terkait PPKM



Tim Gabungan Denpasar meminta 63 kendaraan putar balik terkait PPKM Darurat. (ANTARA/HO-Humas Pemkot Denpasar)

TIM Gabungan Kota Denpasar terdiri atas unsur Polri, TNI, Sat Pol PP dan Dinas Pehubungan setempat 63 unit kendaraan putar balik berkaitan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat pada 3-20 Juli 2021.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Denpasar, Dewa Gede Anom Sayaga di Denpasar, Sabtu, mengatakan kendaraan yang diminta putar balik tersebut setelah dilakukan pemeriksaan pada pos penyekatan karena mereka melakukan

pelanggaran terhadap PPKM Darurat.

Ia mengatakan sesuai dengan data resmi, penyekatan yang dilaksanakan sejak pagi hari ini menyasar lima titik pintu masuk Kota Denpasar, yaitu di Pos Penyekatan Simpang Jalan Cokroaminoto - Jalan Gunung Galunggung tercatat sebanyak 10 orang diminta putar balik, 31 orang dilaksanakan pembinaan dan satu orang diganjar denda.

Selanjutnya di Pos Penyekatan Biaung, Jalan Bypass Ida Bagus Mantra tercatat sebanyak lima orang diminta putar balik. Ketiga, di Pos Penyekatan Jalan Kebo Iwa tercatat sebanyak 29 orang diminta putar balik. Keempat, di Pos Penyekatan Jalan Gunung Salak tercatat 19 orang diminta putar balik dan terakhir di Pos Penyekatan Jalan Gunung Sanghyang.

Dewa Sayoga mengatakan ganjaran berupa denda, pem-

binan dan putar balik dilaksanakan sesuai dengan tingkat kesalahan. Secara umum, untuk yang diminta putar balik karena syarat perjalanan tidak terpenuhi. Hal ini berkaitan dengan surat keterangan bekerja, sertifikat vaksinasi dan hasil rapid test/PCR negatif bagi pelaku perjalanan antardaerah.

Ia mengatakan pelaksanaan penyekatan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan. Berdasarkan pemantauan satelit bahwa di Kota Denpasar kegiatan masyarakat mobilitasnya masih cukup tinggi.

“Dari pos penyekatan ini merupakan upaya untuk memastikan seluruh masyarakat mempedomani atau menerapkan aturan saat PPKM Darurat, hal ini utamanya untuk menekan mobilitas masyarakat,” katanya. **(ant)**

Badung Lakukan Pengawasan untuk Pastikan PPKM Darurat Dilakukan

Pemerintah Kabupaten Badung, Bali, bersama sejumlah instansi terkait terus melakukan pengawasan untuk memastikan pelaksanaan berbagai aturan selama masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

"Ini semua adalah untuk dan demi semua masyarakat dalam menekan penyebaran pandemi COVID-19 yang semakin hari semakin meningkat angka kasusnya," ujar Sekretaris Daerah Kabupaten Badung I Wayan Adi Arnawa di Mangupura, Minggu.

Ia mengatakan, pihaknya meminta seluruh masyarakat untuk dapat menjalankan protokol kesehatan dan aturan pemerintah agar pandemi COVID-19 dapat terkendali.

Pihaknya juga akan terus melakukan patroli dan sidak di berbagai titik-titik potensi keramaian masyarakat seperti lokasi usaha kuliner, objek wisata serta pusat perbelanjaan untuk mengajak masyarakat mematuhi protokol

kesehatan serta memastikan penerapan PPKM Darurat.

"Nanti kalau situasi normal kembali, pasti semua akan dibuka lagi seperti objek wisata, mall dan tempat yang memungkinkan untuk mengisi keramaian. Kami berharap semoga pandemi ini cepat berlalu dan kehidupan bisa normal kembali," katanya.

Ia memberikan contoh, untuk aturan di lokasi usaha restoran maupun warung, dalam aturan telah jelas disebutkan pembeli tidak diizinkan makan di tempat yang dengan waktu operasional hingga pukul 20.00 Wita.

"Mari bersama kita di Badung ini untuk melaksanakan kebijakan PPKM Darurat dengan baik dan disiplin, karena jika masih ada makan di tempat akan timbul



Sekda Badung I Wayan Adi Arnawa memberikan imbauan kepada pelaku usaha untuk mematuhi aturan PPKM Darurat. ANTARA/Naufal Fikri Yusuf

kerumunan. Kita hindari hal itu," ungkapnya.

Sekda Adi Arnawa menambahkan, dalam penegakan aturan PPKM Darurat di wilayah Kabupaten Badung, pemerintah daerah bersinergi dengan pihak keamanan seperti Dandim 1611 Badung, Polresta Denpasar, Polres Badung, Kejaksaan Negeri

Badung.

"Kegiatan ini merupakan sinergitas pemerintah daerah dengan jajaran terkait lainnya di dalam mengawal instruksi pemerintah pusat terkait PPKM Darurat dan juga untuk memberikan himbauan kepada seluruh masyarakat karena PPKM ini lebih ketat dari sebelumnya," ujarnya. (adv)

Seluruh Destinasi Wisata di Badung Tutup Saat PPKM Darurat



Pecalang atau petugas keamanan adat Bali meminta wisatawan untuk meninggalkan kawasan wisata Pantai Kuta di Badung, Bali, Sabtu (3/7/2021) kemarin. ANTARA/Naufal Fikri Yusuf

SELURUH objek dan destinasi wisata di wilayah Kabupaten Badung, Bali, ditutup selama masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat pada 3-20 Juli 2021.

"Kami pastikan objek wisata

sudah ditutup hingga tanggal 20 Juli mendatang," ujar Sekretaris Daerah Kabupaten Badung I Wayan Adi Arnawa di Mangupura, Minggu.

Ia mengatakan, secara prinsip pengelola seluruh objek wisata di

wilayah Badung sangat taat terhadap aturan-aturan yang terdapat dalam PPKM Darurat sebagai upaya dalam menekan angka persebaran pandemi COVID-19.

"Dari laporan Kepala Dinas Pariwisata, di Badung ini semuanya tutup, tidak ada yang nekat buka. Tentu sangat berat apalagi Badung ini mengandalkan hidup dari pariwisata yang paling terdampak dengan pandemi ini. Kami menyadari dengan hal itu, tapi mari kita ikuti aturan PPKM Darurat ini dan jalani kehidupan dengan pola hidup sehat dan prokes," katanya.

Sementara itu, Bendesa Adat Kuta Wayan Wasista mengatakan, pihaknya telah mengikuti kebijakan pemerintah dalam PPKM Darurat dengan menutup sementara destinasi pariwisata utama di Bali yaitu Pantai Kuta.

"Yang jelas kita ikuti apa yang menjadi kebijakan. Jadi wajib kita taati dengan fasilitas umum ini

kita tutup, selain kawasan Pantai Kuta di wilayah kami mal-mal juga tutup," ungkapnya.

Selama penutupan sementara Pantai Kuta itu, pihaknya telah memasang sejumlah tanda larangan masuk pantai serta menyiagakan Pecalang atau petugas keamanan adat Bali untuk memastikan tidak ada wisatawan yang mengunjungi pantai.

Ia berharap, dengan penutupan kawasan pariwisata tersebut, pandemi COVID-19 dapat segera berakhir dan kondisi perekonomian masyarakat serta pariwisata dapat kembali pulih.

"Masyarakat kami termasuk para pedagang-pedagang yang berjualan di Pantai Kuta sangat terdampak perekonomiannya apalagi dengan adanya penutupan saat PPKM Darurat ini. Namun kita harus tetap taati dengan harapan pandemi dapat cepat berlalu," ujar Wayan Wasista. (adv)

Pemkab Badung Pastikan Stok Oksigen di RSD Mangusada Aman

PEMERINTAH Kabupaten Badung pastikan ketersediaan oksigen di Rumah Sakit Daerah (RSD) Mangusada Badung masih aman di tengah meningkatkan kasus COVID-19.

“Kesiapan oksigen kami di RSD Mangusada cukup siap dan aman karena setiap hari Rabu dari pihak penyuplai oksigen datang untuk mengisi ulang oksigen,” ujar Sekretaris Daerah Kabupaten Badung I Wayan Adi Arnawa saat melaksanakan pemantauan ke RSD Mangusada, Selasa.

Ia mengatakan, pihaknya bersama Satgas COVID-19 Badung melakukan peninjauan untuk memeriksa ketersediaan oksigen karena informasi bahwa ketersediaan oksigen di luar daerah yang banyak mengalami kekurangan.

Menurutnya, seluruh jajaran di Badung harus mengambil langkah-langkah antisipasi agar di wilayah Badung tidak sampai mengalami kekurangan oksigen

untuk kebutuhan medis.

“Tabung oksigen ini saya rasa jumlahnya seimbang dengan pertumbuhan Bed Occupancy Rate (BOR). Kalau BOR-nya meningkat dan banyak pasien dalam rumah sakit tentunya pasokan oksigen akan dibutuhkan lebih banyak lagi. Namun, saya pastikan BOR di sini masih stabil di antara untuk yang isolasi dan untuk yang ICU,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Sekda Adi Arnawa juga memantau kesiapan Gedung D dan F yang baru dibangun di rumah sakit itu untuk mengetahui sarana dan prasarana apa saja yang masih dibutuhkan.

Menurutnya, Gedung D sudah sangat siap dan hanya sarana dan prasarana pendukungnya saja yang belum siap, karena saat ini kondisi keuangan Badung yang masih cukup terdampak akibat pandemi COVID-19.

“Kami sudah mengkaji dengan tim di sini karena bagaimana-



Sekda Badung I Wayan Adi Arnawa (kanan) saat melaksanakan pemantauan ke RSD Mangusada untuk memastikan ketersediaan oksigen, Selasa (6/7). ANTARA/HO-Pemkab Badung

pun walaupun dalam kondisi COVID-19 ini kita tidak boleh diam. Di satu sisi kita akan dorong bagaimana kesiapan kita untuk menyiapkan kamar untuk COVID-19, di sisi lain pelayanan kesehatan kepada masyarakat umum harus tetap jalan,” ujarnya.

“Oleh karena itu, Gedung D harus menjadi prioritas, mudah-mudahan kita bisa mencari solusi untuk mendorong sarana dan prasarana sehingga gedung bisa digunakan dan bisa melayani masyarakat sepenuhnya,” ujar Sekda Adi Arnawa. (adv)

Menko Luhut Apresiasi Penanganan Pandemi COVID-19 di Badung



Bupati Badung, Bali, I Nyoman Giri Prasta mengikuti Rapat Koordinasi Implementasi PPKM Darurat untuk wilayah Provinsi Bali dan Jawa timur secara virtual dari Mangupura, Badung, Rabu (7/7). ANTARA/HO-Pemkab Badung

MENTERI Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengapresiasi Bupati Badung, Bali, I Nyoman Giri Prasta atas capaian indikator kinerja yang baik dalam menekan penye-

baran pandemi COVID-19.

“Kami memberikan apresiasi kepada Bupati Badung yang sudah menjadi terbaik di Provinsi Bali dalam capaian indikator kinerja penanganan COVID-19 di wilayahnya,” ujar Menko Luhut

Pandjaitan saat Rapat Koordinasi Implementasi PPKM Darurat untuk wilayah Provinsi Bali dan Jawa timur secara virtual yang diikuti dari Mangupura, Badung, Rabu.

Ia mengatakan, untuk mengukur efektifitas kinerja dalam menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di daerah masing-masing, pihaknya menggunakan alat ukur indeks mobilitas masyarakat.

“Penurunan angka kasus bisa terjadi jika ada penghentian aktivitas masyarakat dari 30 persen hingga 50 persen. Mobilitas masyarakat paling berpengaruh, jadi saya mohon kita semua memahami anatomi masalah. Dengan memahami ini, kita akan tahu cara kerja kita harus bagaimana,” katanya.

Menko Marves Luhut Pandjaitan menambahkan, dirinya meminta para pejabat daerah bisa menjadikan indeks mobilitas itu sebagai acuan untuk mengukur

kinerja optimasi PPKM Darurat.

“Kapolres, Dandim, Kapolda dan Pangdam bisa melihat daerahnya masing-masing dari indeks mobilitas masyarakat ini. Dengan target menurunkan mobilitas masyarakat sebanyak 50 persen, kita berharap tanggal 20 Juli nanti bisa mulai membaik,” ungkapnya.

Sementara itu, Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta mengatakan, pihaknya telah menjalin sinergi dengan sejumlah pihak terkait untuk pengawasan dan penerapan PPKM Darurat di Badung.

Pihaknya juga sudah mengaktifkan Satgas Gotong Royong di Kecamatan, Kelurahan/Desa dan Desa Adat, dengan dibantu Babinsa dan Babinkamtibmas untuk penerapan PPKM Darurat di lingkup terkecil masyarakat.

“Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat di Badung ini sangat ditaati dan dipatuhi masyarakat,” ujarnya. (adv)

Pemkab Badung Apresiasi Komitmen BMPS Majukan Pendidikan

PEMERINTAH Kabupaten Badung, Bali, mengapresiasi komitmen Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Badung dalam upaya memenuhi hal dasar masyarakat khususnya dari segi bidang pendidikan dalam rangka untuk memberikan edukasi kepada masyarakat setempat.

"Kami memberikan ruang kepada peran swasta dengan tetap mendorong dari sisi APBD untuk dapat memberikan beberapa stimulus terhadap swasta dalam rangka untuk menjaga eksistensi daripada perguruan swasta," ujar Sekretaris Daerah Badung, I Wayan Adi Arnawa dalam keterangan Humas Badung yang diterima di Mangupura, Jumat.

Ia mengatakan, stimulus tersebut salah satunya diberikan dalam bentuk bantuan berupa biaya operasional, termasuk bantuan insentif kepada para guru dan anak-anak termasuk juga berupa

seragam sekolah.

"Ini merupakan bagian dari kebijakan kami di pemerintahan Kabupaten Badung kepada para perguruan swasta yang ada di wilayah kami," katanya.

Sekda Adi Arnawa menjelaskan, pemerintah telah memberikan panduan dan aturan kepada seluruh pihak untuk membangun dunia pendidikan termasuk bagi lembaga pendidikan swasta yang juga terus berupaya menjaga eksistensinya melalui penerimaan siswa baru.

"Kami harap Badan Musyawarah Perguruan Swasta ini dapat segera melakukan evaluasi untuk membahas bagaimana dapat menarik orang untuk bersekolah di swasta," ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Badan Musyawarah Perguruan Swasta Badung I Wayan Reta menjelaskan, BMPS memiliki empat tugas pokok diantaranya adalah sebagai



Sekda Badung I Wayan Adi Arnawa (tengah) saat Rapat dengar pendapat terkait penyusunan anggaran rumah tangga dan program kerja BMPS Badung. ANTARA/HO-Pemkab Badung

badan aspirasi terhadap jajaran yang ada di satuan pendidikan, tugas edukasi, tugas advokasi terhadap Badan Musyawarah Perguruan Swasta dan secara kelembagaan berada di pusat sampai daerah melalui salah satu hak dasar rakyat terpenuhi.

"Untuk itu kebijakan pemerintah pusat dalam memperluas kebijakan belajar dalam rangka penuntasan wajib belajar, peningkatan mutu pendidikan pada semua dan jenjang jenis pendidikan yang ada, disertai penuntasan wajib belajar," ujarnya. (adv)

Pemkab Badung Terus Awasi Pelaksanaan PPKM Darurat



Sekretaris Daerah Kabupaten Badung I Wayan Adi Arnawa (kedua kiri) melakukan pengawasan penerapan PPKM darurat. ANTARA/Naufal Fikri Yusuf

PEMERINTAH Kabupaten Badung, Bali, terus melakukan pengawasan terkait penerapan berbagai aturan selama pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat dalam upaya mencegah penyebaran COVID-19 di daerah itu.

"Ini kami lakukan untuk memastikan terlaksananya PPKM darurat sesuai dengan arahan pemerintah pusat dengan terus melakukan pemantauan dan pengawasan sampai ke pelosok wilayah di Badung," ujar Sekretaris Daerah Kabupaten Badung I Wayan Adi Arnawa di Mangu-

pura, Minggu.

Ia mengatakan, dengan berbagai aturan dan kebijakan yang harus dijalankan selama PPKM darurat, pihaknya berharap masyarakat agar dapat memahami situasi itu dengan harapan kasus penularan pandemi COVID-19 yang terus meningkat dapat segera menurun dan aktivitas masyarakat dapat segera pulih.

"Kami berharap semoga pandemi COVID-19 yang ini bisa cepat berlalu dan kehidupan masyarakat dapat berjalan seperti dahulu lagi," kata Sekda Adi Arnawa.

Sekda Adi Arnawa menjelaskan, pihaknya juga terus mengajak seluruh masyarakat termasuk para warga negara asing yang berada di seluruh wilayah Badung untuk dapat menjalankan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 secara ketat.

Menurutnya, keberadaan warga negara asing di Badung yang banyak melanggar protokol

kesehatan telah menjadi sorotan dari pemerintah pusat dan oleh karena itu pihaknya menilai peran jajaran Imigrasi sangat penting dengan langkah-langkah penindakan yang lebih tegas.

"Kepada seluruh masyarakat kami harapkan dapat melakukan kerja sama yang baik dalam penanganan pandemi ini sehingga COVID-19 bisa cepat berlalu," ungkapnya.

Pihaknya juga mengapresiasi pihak-pihak terkait lainnya seperti TNI-Polri yang terus bersinergi dengan pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan penerapan protokol kesehatan dan aturan-aturan PPKM darurat.

"Sementara ini penerapan PPKM darurat di wilayah Badung berdasarkan pengawasan kami bersama sudah cukup baik, kepatuhan masyarakat juga cukup bagus namun itu harus terus ditingkatkan," ujar Sekda Badung Adi Arnawa. (adv)

Usaha Non-esensial di Badung Tutup Sementara Selama PPKM Darurat

SELURUH perkantoran dan pertokoan sektor non-esensial di wilayah Kabupaten Badung, Bali, ditutup sementara selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat sesuai dengan Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 10 Tahun 2021.

“Seluruh kegiatan yang bergerak di sektor non-esensial memang harus ditutup hingga tanggal 20 Juli mendatang,” ujar Sekretaris Daerah Kabupaten Badung I Wayan Adi Arnawa di Mangupura, Minggu.

Ia mengatakan terkait kebijakan tersebut, pihaknya juga telah melakukan sosialisasi bersama dengan seluruh jajaran terkait serta melakukan pemasangan stiker penutupan operasional sementara di pertokoan sektor non-esensial.

“Banyak warga yang belum paham terkait kebijakan ini sehingga kami turun untuk melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat yang beraktivitas dalam sektor

non-esensial,” katanya.

Sekda Adi Arnawa menjelaskan setelah upaya sosialisasi, pihaknya memerintahkan kepada jajaran Satpol PP untuk terus menggen-carkan pembinaan kepada masyarakat pelaku usaha sektor non-esensial serta memberikan tindakan tegas dan sanksi kepada pelaku sektor non-esensial yang masih membandel.

Selain itu, pihaknya juga akan melakukan kajian terkait kemungkinan pemberian bantuan bagi masyarakat yang bergerak di sektor non esensial yang perekonomiannya terdampak akibat penutupan sementara selama PPKM Darurat.

“Sebenarnya kami berusaha untuk itu, tapi kami juga harus melihat kondisi fiskal Badung juga. Mudah-mudahan kami bisa bantu, tapi sementara saya akan melaporkan ke Bupati Badung terkait kondisi ini,” ungkap Sekda Adi Arnawa.

Sementara itu, Sekretaris



Sekretaris Daerah Kabupaten Badung I Wayan Adi Arnawa memasang stiker penutupan sementara pertokoan sektor non-esensial. ANTARA/Naufal Fikri Yusuf

Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra menjelaskan, sektor non esensial yang masih buka atau melanggar SE No 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua SE No 9 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan PPKM Darurat COVID-19 dalam Tatahan Kehidupan Era Baru di Provinsi Bali ini akan

diambil tindakan tegas, yakni penyegelan atau penutupan oleh satgas penegakan hukum.

Ia juga menjelaskan sektor non esensial, diantaranya adalah toko pakaian, toko sepatu, seluler, toko peralatan rumah tangga dan yang sejenis, termasuk dealer kendaraan, kantor-kantor swasta. (adv)

Satgas COVID-19 Badung Sidak Perkantoran



Pemantauan pelaksanaan PPKM Darurat di lingkungan OPD Kabupaten Badung. ANTARA/HO-Pemkab Badung

SATGAS COVID-19 Kabupaten Badung, Bali, memantau pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di sejumlah perkantoran di lingkungan Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung, perusahaan daerah, Kantor KONI, Kantor KPU dan Kantor BPN setempat.

“Dari hasil pemantauan dan pengawasan kami terhadap

pegawai Pemkab Badung, perus-da, KPU, KONI, BPN Badung dan beberapa instansi lainnya serta beberapa perusahaan dalam kategori esensial, dapat disimpulkan bahwa aturan PPKM darurat sudah secara konsisten ditaati,” ujar Kepala Satuan (Kasat) Pol PP Badung IGAK Suryanegara di Mangupura, Selasa.

Ia mengatakan, kegiatan sidak tersebut dilakukan untuk

memastikan terlaksananya Surat Edaran Bupati Badung terkait Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam PPKM Darurat di lingkungan Pemerintahan Badung.

“Saat PPKM Darurat, dilaksanakan penyesuaian sistem kerja pegawai aparatur sipil negara dengan tujuan untuk memastikan pelaksanaan pelayanan publik tetap berjalan dengan efektif, mencegah dan mengendalikan penyebaran, namun tetap mengurangi risiko penyebaran pandemi COVID-19,” ucapnya.

Menurut Suryanegara, dari hasil pemantauan, organisasi perangkat daerah pada sektor kritikal, seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Badung, Dinas Kesehatan Badung, Rumah Sakit Daerah dan Puskesmas di Badung, Satuan Polisi Pamong Praja Badung.

Dinas Perhubungan Badung, Badan Pengelola Keuangan dan

Aset Daerah Badung, Badan Pendapatan Daerah/Pasdedahan Agung Badung dan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Badung tetap melaksanakan 100 persen bekerja dari kantor.

“Sedangkan perangkat daerah yang melaksanakan pelayanan publik, seperti Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Badung dan bagian atau bidang pada perangkat daerah kehadiran stafnya rata-rata 25 persen bekerja di kantor dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat,” kata Suryanegara.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPS-DM) Badung I Gde Wijaya menjelaskan aparat sipil negara yang menjalankan tugas kedinasan dari rumah wajib memperhatikan sasaran kinerja dan target kinerja pegawai yang bersangkutan. (adv)

Pemkab Badung Presentasikan Sistem Deteksi Area Tangkapan Ikan

PEMERINTAH Kabupaten Badung, Bali, mempresentasikan sistem pendeteksi area tangkapan ikan menggunakan Sistem Internet of Things 'PATRIOT' pada ajang Kompetisi Inovasi pelayanan Publik (KIPP) tahun 2021.

"Pendeteksi area tangkapan ikan dengan sistem Internet of Things 'PATRIOT' ini menggunakan aplikasi FishGo guna membantu nelayan di Badung agar dapat memaksimalkan potensi perikanan yang dimiliki," ujar Sekretaris Daerah Kabupaten Badung I Wayan Adi Arnawa dalam keterangan Humas Badung yang diterima di Mangupura, Selasa.

Ia mengatakan, dengan menggunakan aplikasi tersebut, nelayan dapat mempersingkat waktu pada saat di tengah laut dan menghemat bahan bakar serta bisa mengetahui informasi terkait rute yang aman untuk melaut.

"Terdapat tujuh fitur baru aplikasi FishGo diantaranya informasi cuaca, ketinggian gelombang air laut, pertolongan pertama apabila terjadi keadaan darurat, lokasi harian daerah potensial penangkapan ikan, laporan jumlah tangkapan ikan harian nelayan serta jumlah pengguna aktif harian," katanya.

Sekda Adi Arnawa menjelaskan, sejak aplikasi itu diluncurkan pada tahun 2019 lalu, saat ini sudah digunakan oleh 1.753 orang pengguna. Selain itu, lokasi penangkapan yang awalnya 292 koordinat sekarang sudah mencapai 951 koordinat.

"Aplikasi FishGo ini memiliki peluang yang besar untuk diterapkan di daerah lain karena Indonesia memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia, didukung jumlah pengguna telepon pintar saat ini sangat tinggi di Indonesia," ungkapnya.



Ilustrasi - Aktivitas nelayan di Kabupaten Badung, Bali. ANTARA/Naufal Fikri Yusuf

Ia menambahkan, aplikasi tersebut merupakan wujud nyata dari komitmen Pemkab Badung dalam meningkatkan perekonomian masyarakat nelayan di tengah pandemi COVID-19, meningkatkan minat generasi muda untuk menjadi seorang nelayan di

masa pandemi dan masa depan.

"Kami juga akan selalu berkomitmen untuk mendukung dan berpihak kepada masyarakat nelayan dalam rangka peningkatan kesejahteraan melalui penerapan teknologi digital," kata Sekda Adi Arnawa. (adv)

Pemkab Badung Terus Berinovasi Optimalkan Pendapatan Daerah



Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta (kiri). ANTARA/HO-Pemkab Badung

BUPATI Badung, Bali, I Nyoman Giri Prasta mengatakan terus berupaya mengali potensi daerah berinovasi untuk mengoptimalkan pendapatan daerah yang mengalami penurunan akibat pandemi COVID-19.

Salah satu upaya yang akan dilakukan ke depannya adalah kebijakan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif berupa denda dan bunga untuk seluruh jenis pajak

daerah dengan syarat wajib pajak tetap membayar pokok pajaknya.

"Tentunya kebijakan ini akan dapat berjalan dengan baik apabila didukung oleh semua pihak, termasuk DPRD Badung," ujar Bupati Giri Prasta dalam keterangan Pemkab Badung yang diterima di Mangupura, Selasa.

Ia mengatakan, pandemi COVID-19 telah menimbulkan dampak sangat besar terhadap

Badung yang bergantung pada sektor pariwisata.

Penutupan Bandara I Gusti Ngurah Rai bagi kunjungan wisatawan asing, pembatasan sosial berskala besar, dan persyaratan dokumen bebas COVID-19 bagi pelaku perjalanan dalam negeri mengakibatkan penurunan kunjungan wisatawan yang sangat signifikan dan berimbas pada sektor pariwisata.

"Kondisi ini menyebabkan penerimaan pajak daerah mengalami penurunan cukup besar selama tahun 2020, kondisi tersebut berbanding lurus terhadap piutang pajak daerah yang mengalami peningkatan cukup signifikan pada tahun 2020," katanya.

Oleh karena itu, Bupati Giri Prasta menjelaskan, untuk meningkatkan pendapatan daerah pihaknya juga melakukan upaya lain yaitu memperluas kerja sama dengan Direktorat Jenderal

Pajak dan Badan Pertanahan Nasional dalam rangka meningkatkan hasil pemungutan pajak.

Ia juga sependapat dengan saran DPRD Badung agar pemerintah daerah lebih realistis dan penuh kehati-hatian dalam rangka merancang kerangka pendanaan lima tahun ke depan.

"Kerangka pendanaan telah dirancang dengan memperhatikan capaian realisasi pendapatan daerah khususnya pendapatan asli daerah selama masa pandemi COVID-19," ungkap Bupati Giri Prasta.

Kerangka pendanaan juga akan disusun dengan segmentasi periode yang meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang diprediksi akan semakin membaik menuju ke arah normal atau seperti sebelum pandemi COVID-19 pada akhir periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). (adv)

Lima Pemuda Gianyar Buka Usaha Warung Kopi setelah Pelatihan Barista

LIMA pemuda yang merupakan alumni Pelatihan Barista oleh Pemerintah Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, membuka warung kopi atau coffee shop, setelah mengikuti pelatihan untuk generasi muda itu.

“Pemkab Gianyar melalui TP. PKK Kabupaten Gianyar dan Dinas Pendidikan Kabupaten Gianyar beberapa waktu yang lalu memberikan pelatihan barista kepada 17 orang anak-anak muda. Pelatihan yang digelar selama 20 hari tersebut kini telah berhasil mencetak wirausaha-wirausaha muda. Terbukti, 5 orang dari mereka telah membangun usaha coffee shop sendiri,” kata Ketua PKK Gianyar, Ida Ayu Surya Adnyani Mahayastra, di Gianyar, Jumat.

Kelima generasi muda itu yakni I Wayan Dede Ananda Kusuma mendirikan Isteria Coffee, I Made Aditya Darma Putra mendirikan Speed Coffee juga kini menjadi pengajar barista di IPB Interna-

sional Bali, I Gusti Ayu Reina Cahyanti mendirikan Simpang Coffee juga menjadi pengajar ekstrakurikuler di SMK Pariwisata, Kadek Eric Saputra mendirikan Nepi Kopi, dan Kadek Agus Darsana Budi mendirikan Mondela Coffee dan segera membuka cabang baru di Denpasar.

Mereka berani dan telah berhasil mempraktekkan program PKH (Pendidikan Kecakapan Hidup) yang telah diberikan Pemkab Gianyar. Melalui pelatihan Barista tersebut mereka memperoleh sertifikat kompetensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi.

“Saya bangga, pelatihan ini telah berhasil membentuk wirausaha-wirausaha muda, pelatihan yang kami berikan bermanfaat bagi mereka, dan ilmu yang mereka dapatkan ini sudah bersertifikasi nasional, diakui secara nasional, ini luar biasa,” ujar Ida Ayu Surya Adnyani Mahayastra.

Baginya kesuksesan dari pelatihan barista tersebut terbukti



Ketua PKK Kabupaten Gianyar Ida Ayu Surya Adnyani Mahayastra berfoto bersama dengan peserta pelatihan barista yang sudah menerima sertifikat. ANTARA/HO- Humas Pemkab Gianyar.

saat para peserta yang mengikuti pelatihan mampu menerapkan ilmu yang mereka dapatkan.

Program PKH pelatihan barista tersebut memberikan kesempatan kepada anak-anak muda generasi milenial untuk memiliki sebuah skill meracik kopi.

“Karena saat ini tidak hanya orang tua saja yang minum kopi namun kalangan anak muda pun

banyak penikmat kopi. Sehingga banyak cafe, coffee shop ataupun kedai kopi yang kita lihat di sepanjang jalan. Ini sudah menjadi tren anak muda, sehingga inilah yang menjadi dasar kami membuat pelatihan Barista yang berbasis kompetensi,” ujar Surya Adnyani Mahayastra saat menyerahkan sertifikat kompetensi di Sekretariat PKK Gianyar. (ant)

Tabanan Berkomitmen Perangi Sampah Plastik Berbasis Sumber



Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya meninjau langsung sekaligus berkomitmen mendukung kegiatan kelompok swadaya masyarakat (KSM) Berlian dalam pengelolaan sampah berbasis sumber di Desa Penebel, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan, Sabtu (3/7/2021). (FOTO Antara News Bali/Pande Yudha/2021)

BUPATI Tabanan I Komang Gede Sanjaya meninjau langsung sekaligus berkomitmen mendukung kegiatan kelompok swadaya masyarakat (KSM) Berlian dalam pengelolaan sampah berbasis sumber di Desa Penebel, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan, Sabtu.

Desa Penebel menjadi salah satu desa di Kabupaten Tabanan

yang telah menerapkan pengelolaan sampah berbasis sumber sejak bulan Juni 2020. Masyarakat desa bersama-sama mendukung imbauan pemerintah, sehingga sampah bisa diolah sendiri dan tidak tertimbun, apalagi sampai keluar dari desa.

Dengan menggunakan sepeda motor, Bupati Sanjaya tiba di KSM Berlian, Desa Penebel, Kecamatan

Penebel sekitar pukul 10.00 wita.

Bupati Tabanan Komang Gede Sanjaya mengatakan seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk yang menghasilkan volume dan jenis sampah, baik limbah rumah tangga atau industri, berdampak pada kecenderungan pertumbuhan sampah organik dan anorganik.

Apabila tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan berbagai dampak buruk, seperti pencemaran dan gangguan kesehatan. Oleh sebab itu, KSM Berlian di Desa Penebel yang berarti bersih lingkungan asri dan nyaman tersebut setiap harinya mengolah 2-3 kibik sampah perhari yang berasal dari sembilan Banjar Dinas.

Ia mengharapkan pengolahan sampah ini mampu menjadi solusi dalam pengelolaan sampah yang kedepannya dapat menjadi manfaat positif bagi masyarakat setempat.

“Kalau bicara sampah, kita

tidak mungkin bisa mengerjakan sendiri, sebesar apapun kekuatan kita. Tapi dengan dukungan Peraturan Gubernur 47 Tahun 2019 tentang sampah yang berbasis sumber, seluruh pihak terkait harus saling bersinergi untuk menjalankan aturan tersebut agar sesuai dengan konsep visi dan misi nangun sat kerthi loka Bali, melalui tiga hal yang selalu kita jaga, Krama, Budaya dan Sumber Daya Alam yang ada di Bali,” kata Bupati Sanjaya.

Sanjaya menambahkan jika sampah hanya dibuang saja tidak akan menyelesaikan masalah dan hanya akan menumpuk penyakit dan kotoran, sehingga kelestarian lingkungan dan seluruh ekosistem didalamnya pun terancam. Untuk itu, pihaknya mengajak seluruh masyarakat mengolah sampah dengan benar dan sadar dengan bahaya yang akan ditimbulkan oleh sampah, terutama sampah plastik. (ant)

Bupati Klungkung Pantau Pelaksanaan PPKM Darurat di Pasar Galiran

BUPATI Klungkung, I Nyoman Suwirta, bersama Tim Satgas COVID-19 memantau pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Pasar Umum Galiran, Pasar Seni Samarapura, hingga ke Lapangan Puputan Klungkung.

“PPKM ini merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh pemerintah ditengah-tengah masa pandemi yang mengalami peningkatan, terutama di wilayah Jawa-Bali. Masyarakat jangan takut, tetapi mari berfikir positif karena ini adalah salah satu tindakan yang bertujuan untuk menyelamatkan masyarakat agar terhindar dari COVID-19,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima, Senin.

Dalam pemantauan PPKM Darurat pada hari kedua (4/7) itu, Bupati Suwirta melihat situasi pasar sudah mulai sepi, sehingga jarak pun bisa terjaga

dengan baik. Untuk jam buka dan tutup pasar masih dilaksanakan seperti biasa dengan catatan agar masyarakat tetap taat mengikuti pelaksanaan prokes ini dengan sebaik-baiknya.

“Jangan sampai ada yang menganggap hal ini sepele. Setelah saya turun ke lapangan, ternyata para pedagang dan pengunjung di pasar sudah sangat taat mengikuti prokes. Nah, tentu hal ini harus dipertahankan dan di tingkatkan ke depan,” harap Bupati Suwirta.

Selain itu, hal yang tidak kalah penting menjadi perhatian Bupati Suwirta agar para pedagang maupun pengunjung bersama-sama bisa menjaga kebersihan di areal pasar. Jangan ada yang membuang sampah sembarangan, agar suasana yang nyaman dan sejuk selalu tercipta.

“Terima kasih saya ucapkan kepada para pedagang di Pasar Umum Galiran dan Pasar Seni



Bupati Klungkung, I Nyoman Suwirta, bersama Tim Satgas COVID-19 memantau pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Pasar Umum Galiran, Pasar Seni Samarapura, hingga ke Lapangan Puputan Klungkung, Minggu (4/7/2021). (Antara News Bali/HO-Humas Pemkab Klungkung/2021)

Samarapura yang sudah cukup taat saya lihat mengikuti prokes. Kita semua harus tetap waspada dan semoga COVID-19 ini cepat berlalu,” imbuhnya.

Menurut Bupati, PPKM darurat berlaku di wilayah Jawa dan Bali

mulai dari 3 Juli hingga 20 Juli 2021 dengan mengatur sejumlah pengetatan aturan dalam beraktivitas, di antaranya, pemberlakuan work from home (WFH) 100 persen bagi perusahaan non esensial. **(ant)**

Bupati Bangli Resmikan Laboratorium PCR dan Sistem Tagihan di RSUD



Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arta (Kanan) mendengarkan penjelasan kemajuan sarana di RSUD Bangli (Foto Humas Bangli)

BUPATI Klungkung, I Nyoman Suwirta, bersama Tim Satgas COVID-19 memantau pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Pasar Umum Galiran, Pasar Seni Samarapura, hingga ke Lapangan

Puputan Klungkung.

“PPKM ini merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh pemerintah ditengah-tengah masa pandemi yang mengalami peningkatan, terutama di wilayah Jawa-Bali. Masyarakat jangan takut, tetapi mari berfikir

positif karena ini adalah salah satu tindakan yang bertujuan untuk menyelamatkan masyarakat agar terhindar dari COVID-19,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima, Senin.

Dalam pemantauan PPKM Darurat pada hari kedua (4/7) itu, Bupati Suwirta melihat situasi pasar sudah mulai sepi, sehingga jarak pun bisa terjaga dengan baik. Untuk jam buka dan tutup pasar masih dilaksanakan seperti biasa dengan catatan agar masyarakat tetap taat mengikuti pelaksanaan prokes ini dengan sebaik-baiknya.

“Jangan sampai ada yang menganggap hal ini sepele. Setelah saya turun ke lapangan, ternyata para pedagang dan pengunjung di pasar sudah sangat taat mengikuti prokes. Nah, tentu hal ini harus dipertahankan dan di tingkatkan ke depan,” harap Bupati Suwirta.

Selain itu, hal yang tidak kalah penting menjadi perhatian Bupati Suwirta agar para pedagang maupun pengunjung bersama-sama bisa menjaga kebersihan di areal pasar. Jangan ada yang membuang sampah sembarangan, agar suasana yang nyaman dan sejuk selalu tercipta.

“Terima kasih saya ucapkan kepada para pedagang di Pasar Umum Galiran dan Pasar Seni Samarapura yang sudah cukup taat saya lihat mengikuti prokes. Kita semua harus tetap waspada dan semoga COVID-19 ini cepat berlalu,” imbuhnya.

Menurut Bupati, PPKM darurat berlaku di wilayah Jawa dan Bali mulai dari 3 Juli hingga 20 Juli 2021 dengan mengatur sejumlah pengetatan aturan dalam beraktivitas, di antaranya, pemberlakuan work from home (WFH) 100 persen bagi perusahaan non esensial. **(ant)**

Bupati Karangasem Perjuangkan 32.731 Pelaku UMKM Terima Dana Stimulus

PUTRA dan putri asal Kabupaten Karangasem, Bali, menyabet dua gelar juara dalam lomba-lomba berbasis Vlog yang diadakan oleh Pemerintah Provinsi Bali dalam rangka perayaan Bulan Bung Karno III dengan tema “Wana Kerthi, Taru Prana Bhuna” (pohon sebagai nafas bumi).

Humas Pemkab Karangasem dalam keterangan yang diterima, Kamis, melaporkan putra dan putri dari Karangasem menjadi juara dengan kategori yang berbeda dalam penerimaan hadiah untuk Juara di Gedung Ksirnawa Art Centre, Denpasar (30/6/2021).

Keduanya adalah I Made Adriana asal Desa Budakeling Bebandem yang menyabet Juara II kategori Lomba vlog UMKM IKM dan Ekonomi Kreatif Bali Bangkit Mesari dan Ni Putu Mila Andriani asal Desa Sibetan yang mewakili SMA N 1 Bebandem yang meraih juara I dalam kategori vlog pidato.

“Dengan situasi seperti ini, sudah saatnya kita membantu sesama, melihat potensi bunga Rossella yang tumbuh mekar dilahan tandus Desa Tianyar Kubu, saya tertarik untuk mengangkatnya dalam karya vlog saya,” kata Adriana yang ingin membantu UMKM Bangkit dimasa pandemi.

I Made Adriana mengangkat Rossella celup yang diproduksi oleh UMKM Desa Tianyar Tengah, Kecamatan Kubu untuk dijadikan Vlog pada lomba Bulan Bung Karno Provinsi Bali. Ia mengaku sangat beruntung bisa dipertemukan dengan Wayan Musna Antara sebagai pemilik UMKM Kubu Rossella-19.

Begitu pula dengan Ni Putu Mila Andriani. Siswi SMA N 1 Bebandem tersebut mengungkapkannya dengan pidato yang disampaikannya ingin memberikan pesan supaya generasi muda bisa mengaktualisasi Nilai-nilai Pancasila dimasa pandemi saat ini.



Putra dan putri dari Karangasem menjadi juara dengan kategori yang berbeda dalam penerimaan hadiah untuk Juara di Gedung Ksirnawa Art Centre, Denpasar (30/6/2021). Keduanya adalah I Made Adriana asal Desa Budakeling Bebandem yang menyabet Juara II kategori Lomba vlog UMKM IKM dan Ekonomi Kreatif Bali Bangkit Mesari dan Ni Putu Mila Andriani asal Desa Sibetan yang mewakili SMA N 1 Bebandem yang meraih juara I dalam kategori vlog pidato. (Antara News Bali/HO-Humas Karangasem/2021)

Dalam kesempatan itu, Bupati Karangasem I Gede Dana mengapresiasi putra dan putri asli Karangasem tersebut yang berhasil mendapatkan predikat Juara.

“Saya turut bangga dengan diraihnya dua juara sekaligus

dalam rangkaian lomba ini, selain mengharumkan nama Kabupaten Karangasem, ini juga menandakan bahwa generasi muda Karangasem memiliki bibit unggul yang tidak kalah dengan Kabupaten lainnya,” ujar Gede Dana. **(ant)**



Murid SMPN 3 Negara mendapatkan vaksinasi Covid-19, serta diimbau untuk mendorong keluarganya mengikuti vaksinasi sejenis, Senin (5/7). (Antaraneews Bali/Gembong Ismadi/2021)

PEMERINTAH Kabupaten Jembrana, Bali, memulai pelaksanaan vaksinasi COVID-19 untuk anak berumur 12 tahun

hingga 17 tahun dengan menyasar sekolah-sekolah.

Sebagai sekolah pertama, sebanyak 618 murid SMP

Jembrana Mulai Vaksinasi Untuk Anak

Negeri 3 Negara dari kelas 8 dan 9 mendapatkan vaksinasi yang dilakukan dua tim vaksinator.

“Vaksinasi ini menumbuhkan imunitas tubuh bagi anak untuk melawan Covid-19. Semakin banyak masyarakat mendapatkan vaksin, akan semakin mempersempit potensi penularan,” kata Bupati Jembrana I Nengah Tamba, saat memantau pelaksanaan vaksinasi di SMP Negeri 3 Negara, Senin.

Ia mengatakan, vaksinasi ini merupakan tindak lanjut dari instruksi Gubernur Bali agar setiap kabupaten melakukan vaksinasi terhadap anak umur 12 tahun hingga 17 tahun.

Kepada anak-anak yang sudah mendapatkan vaksin, ia menitip pesan agar mengajak keluarganya untuk melakukan

vaksin, karena sangat bermanfaat.

“Saya berharap anak-anak kita ini bisa menjadi agen kesehatan, yaitu dengan mendorong keluarganya untuk melakukan vaksinasi,” katanya.

Ia juga minta, meskipun sudah mendapatkan vaksin, para murid ini tetap menjalankan protokol kesehatan, termasuk bagi keluarganya.

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Jembrana I Nengah Wartini mengatakan, agar tidak terjadi kerumunan di sekolah, kehadiran murid diatur dalam kelompok dengan jarak masing-masing 30 menit.

“Untuk sekolah lain, jadwal vaksinasi sedang kami koordinasikan dengan Puskesmas di wilayah masing-masing,” katanya. **(ant)**

Satgas COVID-19 Buleleng: Bukti Vaksin-Surat Jalan Jadi Syarat Keluar-Masuk

SATUAN Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 Buleleng mempersyaratkan surat bukti vaksin, identitas diri, dan surat jalan dari kelurahan/kecamatan untuk bisa keluar-masuk wilayah Kabupaten Buleleng, Bali.

“Surat tersebut menunjukkan bahwa mereka betul-betul bekerja di Buleleng atau tujuan kerjanya Denpasar,” ujar Wakil Bupati yang juga Wakil Ketua Satgas COVID-19 Buleleng I Nyoman Sutjidra saat meninjau pos penyekatan di Pos Polisi Desa Pancasari, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Kamis.

Sutjidra menjelaskan masyarakat yang mau melewati pos sekat tersebut harus memenuhi atau membawa beberapa syarat seperti surat vaksin dan surat jalan dari kelurahan/desa atau kecamatan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan benar-benar bekerja di Denpasar untuk yang dari Buleleng atau sebaliknya.

“Jadi betul-betul ada keperluan. Jika tidak ada keperluan

mendesak akan diputar balik. Itu sudah tegas sekarang karena untuk mengantisipasi kenaikan daripada lonjakan kasus infeksi COVID-19 ini,” jelasnya.

Pos Polisi Desa Pancasari menjadi salah satu dari beberapa pos sekat yang dibuat di wilayah Buleleng. Selain itu, ada pula pos sekat yang dibuat di Desa Tajun, Kecamatan Kubutambahan; Desa Sambirenteng, Kecamatan Tejakula; dan Desa Sumberklompok, Kecamatan Gerokgak.

Pos-pos yang dibuat tersebut memang menjadi gerbang keluar-masuk Kabupaten Buleleng. Selain dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buleleng, juga didukung oleh TNI dan Polri. “Karena kasus COVID-19 di Buleleng saat ini sedang mengalami kenaikan,” ucap Sutjidra.

Sutjidra pun mengatakan kegiatan perekonomian masih bisa melewati pos sekat. Sesuai dengan aturan, sektor esensial seperti logistik dan energi, termasuk bidang konstruksi.



Wakil Bupati yang juga Wakil Ketua Satgas COVID-19 Buleleng I Nyoman Sutjidra saat meninjau pos penyekatan di Pos Polisi Desa Pancasari, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Kamis (8/7/2021). (FOTO Antara/Made Adnyana/2021)

Namun, untuk masyarakat yang hanya berkunjung, bersilaturahmi, disarankan untuk ditunda dulu.

Dengan situasi kasus COVID-19 yang meningkat ini, jika tidak ada kepentingan yang mendesak atau darurat, diimbau untuk tetap di rumah saja.

“Sesuai dengan Surat Edaran Gubernur Bali sampai tanggal 20 Juli 2021 untuk PPKM Darurat ya. Mudah-mudahan kita bisa tangani semua karena situasi COVID-19 yang sekarang ini sudah sangat kritis sekali, mengkhawatirkan,” kata dia. (ant)



Destinasi tujuan wisata (DTW) Tanah Lot di Kabupaten Tabanan, Bali ditutup selama PPKM darurat pada 3-20 Juli 2021. ANTARA/Pande Yudha

SELURUH kawasan objek wisata di Pulau Bali ditutup selama PPKM darurat di Jawa-Bali pada 3-20 Juli 2021, termasuk destinasi tujuan wisata Tanah Lot, Kabupaten Tabanan, Bali.

Kadiv Promosi dan Pengembangan DTW Tanah Lot Made Suartini di Tabanan, Sabtu, mengatakan penutupan Tanah Lot itu berkaitan dengan keputusan Pemprov Bali menutup pintu masuk untuk wisatawan

Tanah Lot Ditutup Selama PPKM Darurat

mancanegara selama PPKM darurat di seluruh wilayah Bali.

Selain menutup pintu masuk di Bandara Ngurah Rai, Pelabuhan Padangbai, dan Pelabuhan Gilimanuk, objek wisata di Bali juga ditutup selama PPKM darurat yang berlaku pada 3-20 Juli 2021.

“Terkait masa penutupan hingga batas waktu yang ditentukan, apakah diperpanjang atau tidak, kami masih menunggu instruksi dari atas,” ujarnya.

Selama penutupan berlangsung hingga 20 Juli mendatang, kegiatan operasional di kawasan wisata Tanah Lot

tetap berjalan sebagaimana biasanya, seperti penjagaan dan perawatan.

“Mudah-mudahan situasi nggak berkepanjangan, penutupan ini hanya sampai 20 Juli, pada tahun lalu sudah pernah merasakan objek wisata ditutup, mudah-mudahan ditutupnya tidak lama-lama seperti tahun kemarin itu,” katanya.

Sementara data kunjungan wisatawan ke objek wisata Tanah Lot, sebelum PPKM darurat Jawa-Bali diberlakukan, kunjungan pada Juni lalu per hari mencapai 1.000 orang, sedangkan awal Juli mencapai 600 orang per hari. (ant)

Pembangunan Asrama STAHN Mpu Kuturan Singaraja Dimulai

PEMBANGUNAN Asrama di STAHN Mpu Kuturan Singaraja, Kabupaten Buleleng, Bali, dimulai secara resmi dengan upacara pecaruan eka sata yang dilanjutkan dengan peletakan batu pertama pata tilem sasih kasa di Singaraja, Jumat pagi.

Peletakan batu pertama dilakukan oleh Ketua STAHN Mpu Kuturan Singaraja Dr. I Gede Suwindia, S.Ag, M.A didampingi para wakil ketuaduan juga dihadiri langsung oleh Kasatker Penyedia Perumahan Kementerian PUPR Provinsi Bali, I Wayan Suardana.

Asrama STAHN Mpu Kuturan Singaraja yang berlokasi di Jalan Pulau Menjalangan, No 27 Lingkungan Banyuning Selatan, Kelurahan Banyuning itu dibangun atas hibah dari Kementerian PUPR. Pembangunan itu menelan anggaran Rp14,593 miliar dengan durasi pengerjaan selama 229 hari kalender.

Gede Suwindia mengungkapkan, agenda peletakan batu pertama awalnya akan dilakukan oleh Gubernur Bali Wayan Koster,

namun karena kondisi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, maka diputuskan kegiatan seremonial hanya dilakukan secara internal dan terbatas.

“Agenda besar ground breaking dihadapkan dengan pilihan PPKM Darurat. Tetapi niat tulus dan bakti kami adalah melaksanakan ritual Kehinduan. Bahwa saat membangun, kita meletakkan pondasi sebagai bentuk rasa bakti menyatukan pertiwi dan akasa agar diberikan restu sehingga pembangunan diberikan kelancaran,” jelasnya.

Suwindia pun tidak henti-hentinya mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Kementerian PUPR yang telah memberikan hibah pembangunan asrama di tahun 2021.

“Kami berharap seluruh sivitas akademika mendoakan agar pembangunan ini berjalan sesuai dengan harapan. Mari kita dukung bersama,” ungkapnya.

Sementara itu, Wayan Suardana



Upacara pecaruan eka sata yang dilanjutkan dengan peletakan batu pertama pata tilem sasih kasa di Singaraja, Jumat (9/7) pagi, mengawali pembangunan Asrama di STAHN Mpu Kuturan Singaraja, Kabupaten Buleleng, Bali. (Foto Antara News Bali/HO-STAHN Mpu Kuturan/2021)

meminta agar seluruh sivitas akademika STAHN Mpu Kuturan ikut andil dalam melakukan pengawasan terhadap pembangunan asrama yang dibiayai dari Dana APBN Tahun 2021. Upaya ini sebagai langkah antisipasi agar barang yang diberikan sesuai dengan spesifikasi.

“Pengawasan tidak mungkin kami lakukan sendiri. Karena yang memakainya adalah pihak STAHN. Jangan sampai barang yang diberikan tidak sesuai dengan spek. Bapak dan Ibu kami harapkan kalau menerima barang tidak sesuai spek agar disampaikan ke kami. Bukan ke pihak rekanan,” katanya. **(ant)**

Selama Juni 2021, Bandara Ngurah Rai Layani 462 ribu Penumpang



Penumpang pesawat tiba di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Badung, Bali, Kamis (1/7/2021) lalu. ANTARA/Naufal Fikri Yusuf

BANDAR Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali, melayani penumpang sebanyak 462.977 orang yang diangkut dengan menggunakan 3.527 pesawat udara pada periode Juni 2021.

“Pada periode Juni 2021 terdapat pertumbuhan positif pada penumpang dan pesawat udara

di Bandara Ngurah Rai serta menjadikan catatan ini sebagai capaian terbanyak hingga pertengahan tahun 2021,” ujar General Manager Kantor Cabang PT Angkasa Pura I (Persero) Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali, Herry A.Y. Sikado di Kabupaten Badung, Minggu.

la menjelaskan, dari pencapaian selama bulan Juni 2021 itu, jika dilakukan perbandingan dengan catatan statistik pada bulan Mei 2021 maka terjadi peningkatan hingga 72 persen.

Untuk tiga rute tujuan terbanyak masih sama dengan periode Mei yaitu Jakarta menempati posisi pertama dengan jumlah 117,404 penumpang berangkat, diikuti Surabaya 36,523 penumpang berangkat dan Bandung diposisi tiga terbanyak dengan jumlah 11.858 penumpang.

Herry Sikado menambahkan, untuk tiga maskapai yang beroperasi terbanyak mengangkut penumpang pada periode Juni 2021 yaitu Citilink Indonesia sebanyak 111,229 penumpang, Lion Air 106.691 penumpang, Batik Air 90,578 penumpang.

“Jika dilihat dari persentase yang ada, tentunya ini merupakan

sebuah pencapaian positif di tengah kondisi saat ini,” katanya.

Untuk keseluruhan, menurutnya penumpang yang dilayani di Bandara Ngurah Rai selama enam bulan pertama pada tahun 2021 mencapai 1.673.376 orang penumpang.

Herry Sikado menjelaskan, dengan meningkatnya jumlah penumpang, pihaknya terus melakukan upaya penerapan protokol kesehatan agar penumpang dapat terbang aman dan nyaman, termasuk beberapa waktu yang lalu telah melakukan perubahan alur pemeriksaan dokumen sebelum berangkat.

“Kami akan terus bersinergi bersama para stakeholder terkait dalam penerapan protokol kesehatan serta dukungan dari pemerintah tentang kebijakan persyaratan bepergian yang diberlakukan,” ujarnya. **(ant)**

BI Bali: Wisata Medis Pilihan Cerdas Bangkitkan Pariwisata

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Trisno Nugroho berpandangan wisata medis menjadi pilihan yang cerdas untuk membangkitkan kembali dunia pariwisata di Pulau Dewata, di tengah kondisi pariwisata saat ini yang menghadapi tantangan cukup besar.

“Saat ini momentum bagi Bali untuk melihat berbagai strategi, peluang, inovasi untuk mendatangkan wisatawan ke Bali. Kami melihat pengembangan medical tourism (wisata medis) sebagai salah satu andalan pariwisata Bali,” kata Trisno Nugroho di Denpasar, Minggu.

Menurut Trisno, wisata medis di Bali memiliki lima keuntungan. Pertama, perhatian masyarakat saat ini tercurah pada dunia kesehatan. Perhatian kesehatan tidak hanya terbatas dari sisi “terbebas” dari COVID-19. tetapi juga

kehatan dalam arti luas yang mencakup berbagai jenis penyakit.

“Banyak sekali warga negara Indonesia yang berkunjung ke Singapura dan Malaysia hanya untuk memenuhi kebutuhan kesehatan. Peluang ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh Bali,” ucapnya.

Kedua, Badan Pengembangan Pemberdayaan SDM Kesehatan Kementerian Kesehatan menyatakan bahwa Bali memiliki tenaga medis dokter sebanyak lebih dari 3.000 dokter.

Jika dibandingkan secara rasio penduduk terhadap dokter,

satu orang dokter di Bali cukup melayani 1.300 pasien, lebih baik dibandingkan dengan Jawa Timur sebesar 4.500 pasien dan Jawa Tengah 5.800 penduduk.

Ketiga, Bali memiliki dukungan sarana dan prasarana kesehatan yang memadai. Bali memiliki setidaknya ada lima rumah sakit bertaraf internasional di daerah pusat-pusat wisata.

“Selain itu, Bali memiliki pelayanan pengobatan khusus seperti RSUP Sanglah memiliki keunggulan di bidang penyakit jantung, RS Gianyar

di bidang syaraf, RSUD Mangusadha Badung di bidang penyakit trauma dan RS Bali Mandara di bidang penyakit kanker,” ujar Trisno.

Wisata medis juga didukung oleh tersedianya layanan di bidang kesehatan lainnya yaitu layanan wisata kebugaran (wellness tourism). Layanan ini menjadikan orang yang sehat untuk tetap sehat atau menjadi semakin sehat. (ant)



Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Trisno Nugroho dalam suatu kesempatan di Pasar Badung, Denpasar, belum lama ini. ANTARA/HO-BI Bali.

2.456 Personel PLN Bali Pastikan Listrik Andal Selama PPKM Darurat



PPKM Darurat, PLN siagakan 2.456 personel pastikan listrik andal (ANTARA/HO-Humas PLN/2021)

PLN UID Bali menyiapkan 2.456 personel di seluruh Bali untuk memastikan keandalan pasokan di rumah sakit dan fasilitas pendukung lainnya, khususnya yang menjadi rujukan bagi penanganan pasien COVID-19, selama PPKM di Jawa-Bali pada 3-20 Juli 2021.

General Manager PLN UID Bali, I Wayan Udayana di Denpasar, Sabtu, menyampaikan selain personel, PLN juga menyiapkan 45 posko yang dilengkapi dengan 12 unit UPS, 26 unit gardu bergerak, dan 21 unit genset, serta kendaraan pendukung untuk pelayanan teknik maupun tim dari

Pemeliharaan Dalam Keadaan Bertegangan (PDKB).

“Tidak hanya personel dan peralatan yang kami lengkapi, namun juga Standard Operational Procedure untuk memastikan Rumah Sakit Rujukan COVID-19 di Bali pada 11 lokasi bisa aman dari gangguan listrik,” katanya.

Udayana menjelaskan saat ini Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah dipasok oleh dua sumber yang berbeda yaitu dari GI (Gardu Induk) Sanur sebagai pemasok utama dan GI (Gardu Induk) Pesanggaran sebagai cadangan, sehingga jika mengalami gangguan akan dengan mudah memindahkan dari pasokan listrik utama ke pasokan listrik cadangan.

“Hal ini juga diterapkan pada rumah sakit rujukan di masing-masing kabupaten, serta fasilitas pendukung seperti pemasok oksigen dan peralatan medis lainnya,” ucapnya.

Saat ini, menurutnya, subsistem

Bali dalam keadaan aman dengan daya mampu sebesar 1.322,1 MW dan beban puncak 700,6 MW, sehingga cadangan daya 47 persen atau sebesar 621,5 MW.

“Kami berkomitmen untuk mendukung upaya pemerintah menekan angka penyebaran COVID-19 dengan menjaga keandalan listrik. Selain itu kami juga memastikan bahwa petugas kami di garda terdepan telah menerima vaksin,” ujarnya.

Menurut Udayana, PLN secara bertahap telah memastikan sebanyak 1.689 pegawai dan tenaga alih daya telah melaksanakan vaksinasi.

“Kami perusahaan yang dituntut untuk bekerja 24 jam 7 hari, tentu harus dipastikan bahwa petugas khususnya yang berada di lapangan memiliki imunitas yang baik dan mampu memberikan pelayanan terbaik khususnya di masa Pandemi seperti saat ini,” katanya. (ant)